



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦠꦁꦗꦏꦁꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦏꦧꦧꦤꦸꦥꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦏꦧꦧꦤꦸꦥꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul , Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796

Kode Pos 55171 Website: <http://www.bappeda.bantulkab.go.id> e-mail : [bappeda@bantulkab.go.id](mailto:bappeda@bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 06/KPTS/Bappeda/2022

TENTANG

TENTANG RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL

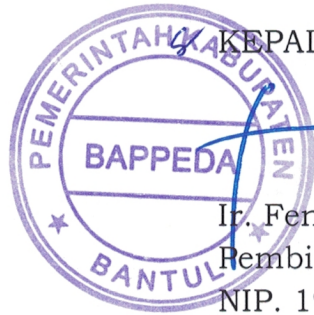
- Menimbang : a. bahwa Reformasi Birokrasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Rencana Kerja untuk implemetasinya.
- b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 194 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kinerja dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- PERTAMA : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul  
Pada tanggal : 2 Februari 2022



KEPALA, *[Signature]*

*[Signature]*  
Ir. Fenty Yusdayati, MT  
Hembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196704031994032008

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Bantul;

Lampiran SK Nomor : 06/KPTS/Bappeda/2022

Tanggal : 2 Februari 2022

**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul merupakan salah satu langkah awal penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani secara cepat, tepat, dan profesional.

Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, perangkat daerah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi.

***Maksud dan tujuan***

Rencana Kerja dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam membangun Reformasi Birokrasi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini agar pembangunan Reformasi Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul focus pada pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan pencapaian dalam pembangunan Reformasi Birokrasi, dengan focus pada penerapan pembangunan komponen pengungkit: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam mewujudkan komponen hasil berupa Rencana yang cakap, bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**

**Pembangunan Komponen Pengungkit**

Pembangunan komponen pengungkit meliputi: Manajemen Perubahan, Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

**1. Manajemen Perubahan**

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
<p>Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Reformasi Birokrasi.</p>	<p>Meningkatnya komitmen seluruh aparatur sipil negara di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam membangun Reformasi;</p>	<p><b>a. Penyusunan Tim Kerja</b></p> <p>Memperhatikan hal berikut: Bappeda telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Reformasi Birokrasi.</p>
		<p><b>b. Dokumen Rencana Pembangunan Reformasi Birokrasi</b></p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen rencana kerja pembangunan Reformasi Birokrasi telah disusun;</li> <li>2) Dokumen rencana kerja pembangunan Reformasi Birokrasi telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Reformasi Birokrasi; dan</li> <li>3) Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan</li> </ol>

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
		Reformasi Birokrasi.
		<p><b>c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Reformasi Birokrasi</b></p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seluruh kegiatan pembangunan Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;</li> <li>2) Terdapat monitoring dan evaluasi</li> </ol>
	Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada ASN Bappeda	<p><b>d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</b></p> <p>Memperhatikan hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Reformasi Birokrasi;</li> <li>2) Agen Perubahan telah ditetapkan;</li> <li>3) Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun; dan</li> <li>4) Seluruh ASN Bappeda terlibat dalam pembangunan Reformasi Birokrasi.</li> </ol>

## 2. Deregulasi Kebijakan

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
Deregulasi Kebijakan bertujuan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis /sinkron yang akan dihapus/direvisi;	Dikeluarkanya peraturan perundang-undangan baru

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk mengevaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Melakukan evaluasi kelembangan dan mengukur tingkat kematangan Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	Kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan

## 4. Penataan Tatalaksana

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
Penataan tata laksana bertujuan untuk menyusun proses bisnis dan prosedur operassional tetap dan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen perencanaan dan pengendalian.	<p><b>a. e-office</b> Mengacu pada kondisi: a) Sistem perencanaan berbasis system informasi b) Sistem pengendalian berbasis system informasi</p>
		<p><b>b. Keterbukaan Informasi Publik</b>  Mengacu pada kondisi: (1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.</p>

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
		(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
	Meningkatnya kinerja.	<b>c. Kinerja organisasi</b>  Mengacu pada kondisi: Nilai evaluasi Akip 85

## 5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Melakukan perhitungan jumlah pegawai sesuai kebutuhan unit kerja	Jumlah pegawai sesuai atau mendekati kebutuhan unit kerja
Penegakan aturan disiplin/kode etik/perilaku pegawai	meningkatnya disiplin SDM aparatur.	Disiplin aparatur Mengacu pada kondisi: 1) 95% karyawan Bappeda datang tepat waktu 2) Telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap keterlambatan pegawai.
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.	Profesionalisme SDM Mengacu pada kondisi: 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi ( <i>capacity building/transfer knowledge</i> ).  2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

**6. Penguatan Akuntabilitas**

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
<p>Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Bappeda untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program kegiatan</p>	<p>meningkatnya kinerja</p>	<p><b>a. Keterlibatan Pimpinan</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan melibatkan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;</li> <li>2) Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja; dan</li> <li>3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.</li> </ol>
	<p>meningkatnya akuntabilitas instansi</p>	<p><b>b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bappeda telah memiliki dokumen Renstra dan Renja.</li> <li>2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil.</li> <li>3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound</i> (SMART).</li> <li>4) Bappeda telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.</li> <li>5) Pelaporan kinerja</li> </ol>



		<p>telah memberikan informasi tentang kinerja.</p> <p>6) Bappeda telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.</p>
--	--	--

### 7. Penguatan Pengawasan

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
		<p><b>a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Bappeda telah membangun lingkungan pengendalian.</p> <p>2) Bappeda telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja.</p> <p>3) Bappeda telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.</p> <p>4) Bappeda telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.</p>
		<p><b>b. Pengaduan Masyarakat</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p>

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
		<p>1) Bappeda telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat.</p> <p>2) Bappeda telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>3) Bappeda telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</p> <p>4) Bappeda Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.</p>
		<p><b>c. Whistle Blowing System</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Bappeda Bantul telah menerapkan <i>whistle blowing system</i>.</p> <p>2) Bappeda Bantul telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>.</p> <p>3) Bappeda Bantul menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>.</p>
		<p><b>d. Penanganan Benturan Kepentingan</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p>

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
		1) Bappeda Bantul telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. 2) Bappeda Bantul telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan. 3) Bappeda Bantul telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. 4) Bappeda Bantul telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 5) Bappeda Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan	Target	Indikator Keberhasilan
Terdapat standar pelayanan, budaya pelayanan prima dan pengelolaan pengaduan	meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	<b>a. Budaya Pelayanan Prima</b>  Mengacu pada kondisi: 1) Bappeda Bantul telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, <i>capacity building</i> dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.

		<p>2) Bappeda Bantul telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.</p> <p>3) Bappeda Bantul telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i>.</p> <p>4) Bappeda Bantul telah melakukan inovasi pelayanan.</p>
		<p><b>b. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</b></p> <p>Mengacu pada kondisi:</p> <p>1) Bappeda Bantul telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.</p> <p>2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.</p> <p>3) Bappeda Bantul telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.</p>

☞ Kepala ☞  
 Badan Perencanaan  
 Pembangunan Daerah  
 Kabupaten Bantul



Ir. Fenty Yusdayati, MT  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196704031994032008